

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 belum diimplementasikan secara tepat berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Dari sisi unsur isi kebijakan, SRA di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 memang telah terimplementasi, terutama dalam hal terkait administratif seperti pemenuhan dokumen untuk evaluasi penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Akan tetapi, aspek yang berkaitan dengan nonteknis, seperti sumber daya dan unsur dari lingkungan kebijakan belum memberikan ruang kebijakan SRA dapat terimplementasi, terutama yang berkaitan dengan faktor manusia. Hal ini tampak dari belum adanya keterlibatan aktif dari pihak terkait lainnya untuk melaksanakan SRA karena perbedaan kepentingan dan sikap kurang responsif terhadap pelaksanaannya, sehingga implementasinya belum menyeluruh di semua sekolah. Kondisi tersebut memengaruhi dampak yang ditimbulkan di lapangan, yakni kondisi pembelajaran di beberapa sekolah belum sesuai dengan nilai perlindungan anak dari konsep SRA. Masih ditemukan praktik yang mengarah pada pelanggaran hak anak dan kecenderungan menimbulkan kekerasan terhadap anak setelah satu tahun penerapan. Belum selarasnya antara dampak, sebagai pengukur keberhasilan implementasi menurut teori implementasi kebijakan dari Grindle, dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan SRA ini, yaitu untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap anak, menunjukkan bahwa SRA belum terimplementasi dengan tepat.

4.2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait bila serius untuk menjadikan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya perlindungan kekerasan terhadap anak, yakni sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mengupayakan instansi/perangkat terkait agar punya kesamaan pandangan dan tujuan dari implementasi SRA dan kesadaran terhadap peran masing-masing dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan intervensi dari pemerintah daerah melalui instruksi khusus terkait penyelenggaraan SRA yang langsung menysasar pihak-pihak terkait. Langkah tersebut dapat memantik tindakan lanjut seperti adanya pembentukan forum komunikasi khusus untuk menyamakan pandangan dan kepentingan mengenai penyelenggaraan SRA di Kabupaten Magelang ke depan.
- b. Pemerintah Kabupaten Magelang, terutama instansi/perangkat daerah terkait, perlu merambah segala akses, sarana, dan prasarana yang telah ada sebelumnya agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung SRA. Hal itu dapat dilakukan dengan mulai memanfaatkan data yang ada, seperti Rapor Pendidikan Kabupaten Magelang (Data Survei Lingkungan Belajar) dan data forum guru serta forum siswa yang telah dibentuk di Kabupaten Magelang. Pemanfaat data tersebut berguna untuk memetakan permasalahan dan jejaring apa saja yang dapat digunakan untuk membantu implementasi SRA di sekolah tepat sasaran.
- c. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan/atau bimbingan teknis sebagai bentuk implementasi SRA kepada sekolah secara bertahap dan berkala agar sistem perlindungan anak dapat terbentuk.